



## **Representasi Konflik Agraria dalam Film *Ben dan Jody***

Aulia Rahma Ritonga<sup>1\*</sup>, Lestari Dara Cinta Utami<sup>2</sup>,

<sup>1</sup>Fakultas Vokasi, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara

### **Abstrak**

Film merupakan medium komunikasi yang memiliki peranan cukup kuat dalam mengkonstruksi dan mengarahkan pikiran audiensnya terhadap makna atau pesan yang dibangun. Pesan-pesan yang dibangun biasanya dikemas dengan sedemikian rupa, melalui penggambaran realistik, sehingga membawa penonton dalam ruang representasi visual yang nyata. Film ini bertujuan untuk melihat bagaimana konflik Agraria direpresentasikan melalui film *Ben dan Jody*. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis tekstual dengan menggunakan pendekatan konstruksionis. Data penelitian diperoleh melalui observasi gambar (*visual image*) dan suara/dialog (*audio*) yang di dalamnya terdapat teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film *Ben dan Jody* mengemas pesan naratif melalui pembangunan set kampung pedalaman, dengan pengambilan gambar yang alami, pemilihan warna yang tepat, dan scoring yang tidak berlebihan. Pengemasan narasi dan visual yang seperti ini pula yang kemudian mampu membawa penonton masuk ke dalam konflik yang dilalui oleh *Ben dan Jody*, sehingga mereka semakin merasa konflik tersebut semakin nyata dalam dinamika konflik agraria yang ada di Indonesia. Film *Ben & Jody* menghadirkan sejumlah bahasan tentang konflik agraria, ketidakadilan ataupun ketidakmampuan penegak hukum, aktivisme, premanisme, hingga perlawanan kelompok akar rumput yang cukup serius. Namun yang menarik mereka (aktor warga lokal) tidak pernah dapat dijabarkan sebagai aktor yang mampu bertutur secara kuat, sebab kerap diredam oleh kelompok-kelompok dominan (korporasi). Film ini juga menunjukkan dengan sangat jelas bahwa masalah adat dan perebutan lahan adalah masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Bahkan hingga kini, masalah tersebut masih belum secara utuh ditemukan jalan keluarnya

**Kata Kunci:** Representasi, Konflik Agraria, Film, *Ben dan Jody*

### **Abstract**

*Film is a medium of communication that has a fairly strong role in constructing and directing the minds of its audience towards the meaning or messages that are constructed. The messages that are built are usually packaged in such a way, through realistic depictions, so as to bring the audience into a real visual representation space. This film aims to see how the agrarian conflict is represented through the film Ben and Jody. The method used in this study is textual analysis using a constructionist approach. The research data were obtained through observing images (visual images) and sound/dialogue (audio) which contained text. The results of the study show that Ben and Jody's film packs a narrative message through the construction of an inland village set, with natural shooting, proper color selection, and a moderate score. Narrative and visual packaging like this is also able to bring the audience into the conflict that Ben and Jody are going through, so that they feel that the conflict is increasingly real in the dynamics of agrarian conflicts in Indonesia. The film Ben & Jody presents a number of discussions about agrarian conflicts, injustice or the incompetence of law enforcers, activism, thuggery, to the serious resistance of grassroots groups. However, what is interesting about them (local citizen actors) can never be described as actors who are able to speak powerfully, because they are often muted by dominant groups (corporations). This film also shows very clearly that customary issues and land disputes are problems that are not easy to resolve. Even now, this problem has not been completely resolved*

**Keywords:** Representation, Agrarian Conflict, Film, *Ben dan Jody*

**How to Cite:** Ritonga, Aulia R., Utami, Lestari D. (2023). *Representasi Konflik Agraria dalam Film Ben dan Jody*. Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan, 2 (1):1-6.s

\*Corresponding author: Aulia Rahma Ritonga

E-mail: [auliarahma@usu.ac.id](mailto:auliarahma@usu.ac.id)

## PENDAHULUAN

Lahan tidak sekedar memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, tetapi juga nilai sosial, filosofis, kultural, serta ekologis. Pada satu sisi, desakan-desakan atas kebutuhan dan pengembangan lahan dalam rangka mendorong pembangunan begitu kuat, sementara di sisi lain luas lahan tidak bertambah dan terbatas. Kebutuhan lahan tersebut tentu saja juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan dari faktor ekonomi (Tjondronegoro, 1999). Gesekan-gesekan seperti ini pula yang pada waktu tertentu dapat menimbulkan konflik, seperti konflik Agraria. Konflik agraria sampai saat ini masih saja menjadi salah satu permasalahan yang kerap hadir pada sektor pertanian di Indonesia (Basuki, Madjiid & Setiawan; 2021).

Konflik agraria hingga saat ini masih menjadi tugas pemerintah yang belum dapat diselesaikan dengan baik, bahkan cenderung mengalami stagnasi dalam proses penyelesaiannya (Laudjeng & Arimbi, 1997). Hal ini dikarenakan konflik agraria memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi, sebab permasalahan tersebut amat berkaitan dengan hukum, politik, ekonomi, hingga hak-hak masyarakat lokal. Konflik tersebut tidak jarang pula berakhir pada terabaikannya hak-hak rakyat yang pada kenyataannya telah berada di sekitar lahan, serta telah mengelola lahan tersebut secara turun temurun. Permasalahan ini berkaitan dengan ketegangan sosial yang tak jarang menyebabkan perseteruan hingga kerusuhan di antara masyarakat, swasta, serta pemerintah (Zakie, 2016). Secara umum, konflik agraria berkaitan erat dengan sengketa lahan antara masyarakat dengan korporasi (swasta) yang memperebutkan hak atas lahan ataupun pengelolaan lahan, baik lahan pertanian, perkebunan, maupun tambang (Kalo, 2012).

Konflik agraria yang berlangsung antara pemegang hak atas tanah (masyarakat lokal), korporasi (swasta), ataupun pemerintah cenderung mengalami perubahan. Hal ini akibat adanya konfigurasi tanah yang selalu berubah, sehingga berdampak pada timbulnya berbagai benturan kepentingan yang terus berkembang dengan beragam modus dan pola kepentingan pula. Dinamika yang berlangsung dalam pengelolaan dan hak atas tanah ini kemudian mengakibatkan sengketa atau konflik agraria tidak kunjung usai. Konflik agraria bukanlah hal baru di Indonesia. Persoalan mengenai konflik agraria telah berakar pada masa yang panjang sejak masa kolonial, orde baru, dan hingga kini bersifat struktural (Maladi, 2012).

Konflik agraria merupakan isu yang amat penting untuk dicari jalan keluarnya guna menjamin stabilitas keamanan nasional. Keamanan dalam hal ini merupakan hasil dari konstruksi. Konflik agraria menjadi masalah keamanan negara, karena adanya *discourse content* dimana setidaknya memberikan pengaruh bagi stabilitas keamanan (Buzan, 1998). Relasi antara konflik agraria dengan isu kekerasan menjadi amat kuat mengingat adanya perkelindanan dan konflik kepentingan di berbagai elemen, mulai dari masyarakat, pemerintah, hingga korporasi (swasta). Hal ini seperti yang ditampilkan pada film *Ben dan Jody* (2022). *Ben & Jody* adalah film drama laga Indonesia tahun 2022 yang disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko berdasarkan karakter Filosofi Kopi karya Dee Lestari. Film produksi Visinema Pictures ini dibintangi oleh Rio Dewanto dan Chicco Jerikho. *Ben & Jody* tayang perdana di bioskop Indonesia pada 27 Januari 2022. Film *Ben dan Jody* merupakan sequel dari film *Filosofi Kopi*, namun film *Ben dan Jody* hadir dengan membawa isu yang cukup erat dengan masyarakat agraria di Indonesia, yakni konflik agraria dan masalah adat. Film ini menampilkan dan membangun narasi mengenai seluk beluk pertanian kelapa sawit, penggusuran masyarakat, hingga kekerasan yang sebenarnya masih marak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu melalui penelitian ini dilihat lebih jauh bagaimana representasi konflik agraria pada film *Ben dan Jody*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini terlebih dahulu dilaksanakan dengan menentukan tema dan film yang hendak dianalisis. Paradigma kritis merupakan paradigma yang digunakan pada penelitian ini, guna mengedepankan analisis menyeluruh dan kontekstual. Metode analisis tekstual sebagaimana yang dijelaskan oleh Mckee (McKee, 2003), dapat membantu untuk

mendapatkan dan membuat interpretasi. Data yang diambil pada penelitian ini menggunakan data primer teks yang dimasukkan dalam bagan berisikan unsur utama pembentuk naratif berdasarkan *sequence*, *scene*, dan *shot* dari awal hingga akhir cerita. Dalam sebuah karya seni, film memiliki dua materi yang menjadi dasar pembuatannya, yaitu materi naratif dan materi sinematografis. Penelitian ini memfokuskan dan membatasi kajian pada materi naratif, yaitu peristiwa, tokoh, latar ruang dan waktu, serta kondisi sosial politik yang memengaruhi pembuatan film tersebut. Maka penulis selain menganalisis teks juga menggunakan data yang diperoleh melalui observasi gambar (*visual image*) guna mendukung analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Film *Ben dan Jody* (2022) secara naratif fokus dalam membahas isu yang khususnya berkaitan dengan perebutan lahan dan masalah-masalah lainnya yang mengiringinya. Dari film ini dapat dilihat secara umum, bahwa konflik perebutan lahan banyak terjadi terutama di pedalaman Indonesia. Melalui film ini pula penonton secara perlahan dapat memahami makna apa yang ingin di bahas dari setiap adegan di awal film. Isu yang dibahas dalam *Ben & Jody* sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Dengan adanya isu ini, masyarakat menjadi sadar bahwa konflik agraria yang cenderung mengarah pada tindakan kekerasan benar-benar terjadi. Pada film ini konflik yang terjadi berfokus pada perkebunan lahan kelapa sawit Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia termasuk bentuk ekspansi lahan yang terbesar. Sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2018 saja, Indonesia telah tercatat menghasilkan dan mengeksport minyak sawit atau CPO (*Crude Palm Oil*) sebesar 43 juta ton. Angka ini bahkan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekspor CPO terbesar di Dunia (Suryadi, Dharmawan & Barus; 2020). Jumlah ini menunjukkan adanya pasar potensial yang mampu menyerap pemasaran minyak sawit (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) di industri atau pasar Indonesia.

Dalam film ini, konflik lahan sawit yang berlangsung pada umumnya bermula dari adanya rasa ketidakadilan terkait cara perusahaan memperoleh lahan dan pembagian manfaat dari penggunaan lahan tersebut bagi masyarakat lokal. Seperti yang diungkapkan oleh Berenschot, Dhiaulhaq, Afrizal & Hospes; 2021), melalui hasil penelitiannya, bahwa salah satu akar dari keluhan-keluhan tersebut dan konflik yang diakibatkannya terkait dengan cara negara membatasi hak-hak atas tanah masyarakat pedesaan. Sumber konflik lainnya terletak pada lemahnya implementasi (dan pelanggaran yang biasa terjadi atas) peraturan-peraturan yang ada. Meskipun undang-undang dan berbagai peraturan telah memuat ketentuan yang melindungi kepentingan warga negara, undang-undang dan peraturan ini seringkali tidak ditegakkan. Akibatnya, masyarakat di sekitar lahan yang berhadapan secara langsung dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit, yang datang relatif baru, menjadi seperti tidak memiliki hak (*rightless*). Bahkan perlindungan hak-hak warga negara seperti tidak efektif apabila melihat konflik yang berujung pada tindakan kekerasan.



Gambar 1. Scene adegan penghalangan warga terhadap kendaraan korporasi

Film *Ben dan Jody* secara intens juga menampilkan adanya konflik yang berujung pada tindakan kekerasan dan anarkis, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok suruhan pihak korporasi swasta kelapa sawit. Melalui film ini direpresentasikan adanya konflik kekerasan, seperti; adegan perkelahian, kejar-kejaran, hingga tembak-tembakan. Adegan ini sebagai upaya dalam menggusur masyarakat kampung yang berada di sekitar wilayah konflik perkebunan kelapa sawit tersebut. Adegan ini memang disetting sedemikian rupa mengingat konflik agraria yang berujung pada kekerasan tersebut kerap kali terjadi di Indonesia (Regina, 2022). Jika melihat adegan ini tampaknya dapat dilihat sebagai isu keamanan yang mengancam warga sekitar akibat penggunaan senjata api dalam membahas penggunaan lahan dan penggusuran tersebut. Buzan (1991), menyebutkan bahwasanya konsepsi keamanan tidak terbatas pada dimensi militer atau kepolisian, tetapi juga pada aspek selain militer. Aspek keamanan dibagi ke dalam lima bidang; militer, politik, lingkungan, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, militer hanyalah salah satu dari dalam sistem keamanan nasional. Persengketaan tanah, dalam hal ini adalah konflik agraria yang didasari oleh sektor ekonomi, akan menimbulkan ketidakamanan nasional. Atas dasar ini pula menjadi penting adanya pengawasan tanah, sehingga konflik seperti yang ditampilkan pada film *Ben dan Jody* tidak perlu terjadi.



**Gambar 1. Scene adegan kekerasan pada konflik**

Film sebagai salah satu medium komunikasi yang bertujuan *to entertain* (menghibur) memiliki peranan yang cukup kuat dalam mengkonstruksi dan mengarahkan pikiran penonton atau audiensnya terhadap makna atau pesan yang dibangun. Pesan-pesan yang dibangun biasanya dikemas dengan sedemikian rupa, melalui penggambaran realistis, sehingga membawa penonton dalam ruang representasi visual yang nyata (Dalimunthe & Saputra, 2021). Film *Ben dan Jody* misalnya, mengemas pesan-pesan tersebut melalui pembangunan set kampung pedalaman, dengan pengambilan gambar yang alami, pemilihan warna yang tepat, dan scoring yang tidak berlebihan. Pengemasan narasi dan visual yang seperti ini mampu membawa penonton masuk ke dalam konflik yang dilalui oleh *Ben dan Jody*, sehingga mereka semakin merasa konflik tersebut semakin nyata.

Dalam banyak adegan film *Ben dan Jody*, direpresentasikan bahwa konflik-konflik agraria yang berlangsung menunjukkan belum efektifnya penyelenggaraan instrumentasi hukum. Penggunaan kekerasan, kriminalisasi (tokoh) penduduk, manipulasi, penipuan, dan pemaksaan persetujuan, yang dilakukan secara sistematis dan meluas merupakan beberapa tampilan yang semakin mempertegas hal tersebut. Keadaan ini sering menyertai upaya penghilangan klaim rakyat atau pengalihan penguasaan atas tanah, SDA dan wilayah kelola rakyat setempat ke konsesi yang dipunyai oleh badan-badan usaha raksasa termaksud. Hal ini sekaligus merupakan eksklusi atau pembatasan akses rakyat terhadap tanah, SDA, maupun wilayah kelolanya. Sebaliknya, terjadi perlawanan langsung dari rakyat maupun yang difasilitasi oleh organisasi-organisasi gerakan sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun elite politik, dilakukan untuk menentang eksklusi, atau pembatasan paksa akses rakyat tersebut. Peran Ben dan Jody yang merupakan pemeran utama dalam film ini juga merefleksikan adanya upaya perlawanan

langsung dari rakyat tersebut, namun mereka tergerak bukan atas perwakilan pemerintah atau pada tataran politis praktis, sebab bergerak atas dasar kemanusiaan.

Masalah pengadaan dan konflik lahan untuk pengelolaan atau penggunaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia cenderung berujung pada konflik agraria. Pertentangan klaim hak atas tanah terjadi antara pengusaha yang telah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah dengan masya-rakat petani yang telah hidup bertahun-tahun di sebuah wilayah dengan sistem tenurialnya sendiri (Colhcester, et al; 2006). Konflik agraria, khususnya yang berkaitan dengan kelapa sawit belum banyak diungkap, sebab amat berkaitan erat dengan bagaimana ekonomi pasar kapitalistik bekerja. Harus dipahami bahwa ekonomi pasar kapitalistik bekerja sama sekali cukup berbeda dengan ekonomi pasar sederhana dimana terjadi tukar-menukar barang melalui tindakan aktivitas belanja atau membeli melalui alat tukar uang. Dalam ekonomi pasar kapitalis, bukanlah ekonomi yang melekat ke dalam hubungan-hubungan sosial, sebaliknya hubungan-hubungan sosial lah yang melekat ke dalam sistem ekonomi kapitalis tersebut (Polanyi, 1967). Pasar kapitalis memiliki kekuatannya sendiri yang diyakini mampu mengatur dirinya sendiri. Namun seperti yang diungkapkan Polanyi, justru badan-badan negara lah yang sesungguhnya membuat pasar kapitalis demikian itu bisa bekerja.

Sistem ekonomi kapitalis membuat segala hal dikomodifikasi menjadi barang dagangan. Namun, khusus untuk tanah (atau lebih luas alam), pasar kapitalis tidak akan pernah berhasil mengkomodifikasi sepenuhnya. Tanah sebagai bagian yang melekat dari alam sesungguhnya bukanlah komoditi atau barang dagangan, sehingga tidak dapat sepenuhnya diperlakukan sebagai komoditi (barang dagangan). Tanah melekat sepenuhnya dengan relasi-relasi sosial yang ada di sekitarnya. Jadi mereka yang memperlakukan tanah (alam) sepenuhnya sebagai komoditi, sesungguhnya bertentangan dengan hakekat tanah (alam) itu sendiri (Polany, 1967). Tanah (alam) yang dibayangkan sebagai sebuah komoditi merupakan *fictitious commodity* atau barang dagangan yang dibayangkan. Bagi Polanyi, dengan menggunakan tanah sebagai barang dagangan, sama saja dengan memisahkannya dari ikatan hubungan-hubungan sosial yang melekat padanya. Tindakan ini pula yang niscaya menghasilkan guncangan-guncangan yang pada akhirnya dapat merusak sendi-sendi keberlanjutan hidup masyarakat.

Terlihat sangat jelas melalui film *Ben dan Jody*, bahwa masalah adat dan perebutan lahan adalah masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Bahkan hingga kini, masalah tersebut masih belum secara utuh ditemukan jalan keluarnya. Sebagai contoh misalnya, sistem pengaduan yang disediakan oleh *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) hanya mampu menerima dan menyelesaikan sangat sedikit kasus. Dari 64 kasus konflik yang secara langsung melibatkan perusahaan kelapa sawit anggota RSPO, hanya 17 kasus yang secara administratif atau resmi dilaporkan ke RSPO. Bahkan dari 17 kasus tersebut, hanya tiga kasus yang mampu diselesaikan. Hal ini berkaitan dengan dengan kompleksitas prosedur RSPO dan keterbatasan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam membantu masyarakat dan konflik yang tengah berlangsung (Colhcester, et al; 2006).

## KESIMPULAN

Film *Ben & Jody* mengkonstruksi penonton mengenai konflik agraria, khususnya perkebunan kelapa sawit yang tidak pernah selesai dan bahkan memiliki banyak korban. Turut sertanya pihak korporasi swasta dalam konflik, seperti pembalakan liar, penggusuran hingga penggunaan senjata tajam semakin menunjukkan melunturnya peran pemerintah yang kurang tegas. Peran sentral para aktor yang membawa *point of view* masyarakat awam atas konflik ini menjadi semakin terasa dekat dengan situasi saat ini. Penonton seakan diajak ikut merasakan posisi para warga yang harus menghadapi ketakutan atas pembalakan liar dan bagaimana keegoisan para kapitalis menguasai tanah-tanah adat. Film *Ben & Jody* menghadirkan sejumlah bahasan tentang konflik agraria, ketidakadilan ataupun ketidakmampuan penegak hukum, aktivisme, premanisme, hingga perlawanan kelompok akar rumput yang cukup serius. Namun yang menarik mereka (aktor warga lokal) tidak pernah dapat dijabarkan sebagai aktor yang mampu bertutur secara kuat, sebab kerap diredam oleh kelompok-kelompok dominan (korporasi). Penggambaran kehidupan masyarakat adat yang digambarkan hidup di tengah hutan dan jauh dari kemajuan

teknologi semakin menegaskan adanya relasi yang cukup kuat antara masyarakat tersebut dengan tanah (bagian dari alam). Konsep representasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa film tidak sekedar memproduksi atau menampilkan kembali sesuatu dihadapan khalayak, tetapi melalui beragamnya konsep representasi menghadirkan maksud tertentu kepada masyarakat. Film *Ben dan Jody* menunjukkan adanya fenomena konflik agraria yang sampai saat ini masih saja sering terjadi, bahkan penyelesaiannya juga tidak jelas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, Azzahra R., Madjid, Adnan, & Setiawan, Bayu. (2021). *Resolusi Konflik Agraria Antara Pt Sentul City Tbk Dengan Warga Desa Bojong Koneng Kabupaten Bogor*. Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik | Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/Drk/Article/View/1146>
- Buzan, People, States & Fears. (1991). *An Agenda For International Security Studies In Post Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Buzan, B. (1998). *Security: A New Framework For Analysis*, Colorado: Lynne Rienner Publisher, Inc.
- Colchester, M., Jiwan, N., Sirait, M., Firdaus, A., Surambo, A., & Pane, H. (2006), *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia - Implications for Local Communities and Indigenous Peoples (published by Forest People Programme (FPP)*. Sawit Watch, HUMA, World Agroforestry Centre (ICRAF) – SEA. <https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/promisedlandeng.pdf>
- Dalimunthe, Maulana A., Irawanto, budi., Budiawan. (2020). *Representation of Papuan identity in the reporting of local newspapers in Yogyakarta*. International Journal of Social Science Research 2 (3), 34-44. <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijssr/article/view/10778>
- Haedar Laudjeng & Arimbi. (1997). *Bayang-Bayang Culturstelsel Dan Domein Verklaring Dalam Praktik Politik Agraria*. Jakarta: Walhi
- Kalo, Syafruddin. (2012). *Di Bawah Cengkeraman Kapitalisme: Konflik Status Tanah Jaluran Antara Onderneming Dan Rakyat Penunggu Di Sumatra Timur Jaman Kolonial*. Usu Digital Library. Diakses 10 Maret 2012.
- Maladi, Y. (2012). *Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria Di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2012. 432-442. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5774>
- Mckee, Alan. (2003). *Textual Analysis: A Beginner's Guide*, London; Sage Publication.
- Polanyi, Karl. (1967). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*.: Beacon Press: Boston.
- Suryadi, Dharmawan, Arya., Barus, Baba. (2020). *Ekspansi dan Konflik pada Perkebunan Kelapa Sawit: Kasus di Desa Terantang Manuk, Kabupaten Pelalawan, Riau*. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol. 08 (03) 2020. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/download/31914/21159/>
- Regina, Kunthi, R. (2022). *Review Film Ben & Jody: Mengejutkannya, Ini Memang Film Rambo*. Kumparan: Jakarta. <https://kumparan.com/kumparanhits/review-film-ben-and-jody-mengejutkannya-ini-memang-film-rambo-1xLMbCeGbWp/full>
- Tjondronegoro, S. (1999). *Sosiologi Agraria*. Yayasan Akatiga: Bandung
- Zakie, Mukmin. (2016). *Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda*. Legality, Vol.24, No.1, Maret 2016-Agustus 2016, Hlm. 40-55. <https://Ejournal.Umm.Ac.Id/Index.Php/Legality/Article/View/4256/4623>